

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) nomor 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004 menjadikan awal mula reformasi keuangan di Indonesia. Ketiga UU ini mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti praktik terbaik taraf internasional (*international best practices*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan UU 17 Tahun 2003 mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (Harun, 2012). Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah harus menciptakan sistem yang baik dan serta meningkatkan standar dalam penyajian laporan keuangan.

Pada tahun 2005 menjadi awal reformasi akuntansi pemerintahan dimana ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan merupakan proses perubahan dari sistem akuntansi pemerintahan secara tradisional ke sistem akuntansi secara modern. Sistem akuntansi secara tradisional menganut basis akuntansi kas. Sedangkan sistem akuntansi modern menganut basis akrual (*Cash Towards Accrual*).

Reformasi akuntansi juga terjadi pada Kementrian/Lembaga (KL) yang pada awalnya Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) tahun 2004-2014 dihasilkan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) dengan basis *Cash Towards Accrual* (CTA). SAKPA merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu satuan kerja dalam pengerjaan akuntansi. Dalam pengerjaannya aplikasi SAKPA menghasilkan neraca dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Namun sejak tahun 2015 penyusunan LKKL menggunakan akuntansi berbasis akrual sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntansi berbasis akrual adalah pencatatan transaksi disaat peristiwa dalam periode akuntansi yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan (Weygandt, 2013). “Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia” (Sony, 2016).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 pasal (3) menjelaskan bahwa pada penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga hal tersebut dijelaskan dalam PMK 270/PMK.05/2014 pasal (1) ayat (2). Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tingkat kementerian/lembaga. Namun dijelaskan lagi dalam pasal 5 ayat (1) bahwa dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana belum dapat dilaksanakan, maka dalam masa transisi di tahun 2015 laporan keuangan berbasis akrual disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

SAIBA merupakan aplikasi komputer dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. SAIBA berisi prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkungan Kementerian/Lembaga Negara (KL) yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. Berbeda dengan SAKPA, aplikasi SAIBA memberikan hasil yang jauh lebih lengkap yaitu berupa LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan Neraca.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya merupakan salah satu instansi yang menggunakan SAIBA sejak tahun 2015. Disnaker Kota Surabaya adalah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Disnaker kota Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas-tugasnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Disnaker juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, dimana SAIBA ini merupakan aplikasi yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang baik, tepat waktu dan diandalkan sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan bentuk sebuah pertanggungjawaban dari perusahaan. Laporan keuangan sangat penting dalam membantu keberhasilan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan tugas dalam menegakkan akuntabilitas keuangan, berikut beberapa alasan pentingnya penelitian terkait implementasi SAIBA dalam menyajikan laporan keuangan dilakukan, yaitu:

1. Laporan keuangan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para *stakeholders* dalam membuat keputusan.
2. Laporan keuangan yang disajikan memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Laporan keuangan ini sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dalam menciptakan *good governance*.

Berdasarkan fenomena dan beberapa alasan penelitian ini perlu dilakukan, maka peneliti bertujuan akan mengambil penelitian terkait implementasi SAIBA terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesiapan pengguna aplikasi SAIBA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan pengguna aplikasi SAIBA terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada kualitas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan yang terkait langsung didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Menambah referensi untuk pembaca yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Instansi**  
Penelitian diharapkan dapat berguna bagi Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi penyusunan laporan keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI yang transparan dan akuntabel. Dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi satuan kerja lain dalam menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI agar lebih baik.
- b. **Bagi Masyarakat**  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang akurat kepada masyarakat atas laporan keuangan yang dibuat Pemerintah melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI khususnya tentang penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi publik.
- c. **Bagi Peneliti**  
Memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaI.